

Involusi Pembangunan Desa Endogen

Muhammad Qowim

Fakultas tarbiyah UIN sunan kalijaga yogyakarta

Email: muhammad.qowim@uin-suka.ac.id

***Abstrac.** Endogenous Rural Development need such projection on it's sustainability. The main indicators of it's sustainability are economic growth, index of happiness and human development index. The research is looking for proper planning methode to support endogenous rural development, staging endogenizing, examining the result and identifying some challenges that may inhibit sustainability of endogeneous development based on local livestock industry. The research has conduct an economic potential survey and share the result as crucial issues on Focus Group Discussion with smallholder breeders. Depart on those discussions, the research has implemented a plan called endogenizing involve endogenizing on economic empowering, endogenizing on mass public sphere and endogenizing on house of people literacy. Having exam through testicleses, the research found several indications of impairment that may inhibit sustainability of endogenous rural development. Those indications are social jealousy, obscurity on law and domestification toward farming and breeding sectors.*

Keywords : Endogenous Rural Development, Economic Growth, Index Of Happiness, Human Development Index, Endogenezing, Local Livestock Industry.

***Abstrak.** Pembangunan Pedesaan Endogen (Endogenous Rural Development) memerlukan proyeksi keberlanjutan (sustainability). Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi, angka kebahagiaan dan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini mencari model perencanaan pembangunan desa endogen, melaksanakan proses endogenisasi, uji petik endogenisasi dan mencari tantangan keberlanjutan pembangunan desa endogen di komunitas peternakan rakyat. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan FGD & Survey, menghasilkan strategi endogenisasi. Pelaksanaan pembangunan endogen dilaksanakan dengan skema; endogenisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, endogenisasi ruang publik masyarakat dan endogenisasi rumah literasi masyarakat. Hasil uji petik pembangunan endogen mengindikasikan terdapat gejala pelemahan endogenisasi yang bersumber dari kecemburuan sosial, kaburnya kepastian hukum dan domestifikasi sektor pertanian & peternakan.*

Kata Kunci : Pembangunan Pedesaan Endogen, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kebahagiaan, Indeks Pembangunan Manusia, Endogenisasi, Sentra Peternakan Rakyat.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Pedesaan Endogen merupakan konsep penerapan dari Pembangunan Regional Endogenus dalam skala pedesaan yang bersifat multidimensi dengan melibatkan banyak aktor dan mencakup multi-aspek dalam prosesnya. Berbeda dengan konsep pembangunan pedesaan eksogen yang telah ada sebelumnya, konsep ini berpijak pada paradigma baru pembangunan desa yang mengedepankan kesesuaian pembangunan, pembaruan fungsi dan proses pasca produksi pedesaan. Jika pembangunan pedesaan eksogen menginisiasi gerakan dari luar ke dalam pedesaan, maka pembangunan pedesaan endogen justru sebaliknya, yaitu dikontrol sepenuhnya oleh komunitas lokal (Widodo, Teguh 2015).

Salahsatu desa yang saat ini tengah mengembangkan desa endogen, adalah Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Masyarakat desa ini membangun Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kebon Wulangreh yang menjadi wadah paguyuban bagi lima kelompok ternak berbadanhukum dan satu kelompok wanita tani (KWT). Tahun 2015, masyarakat membentuk kelompok ternak sapi bernama Kandang Kalimosodo. Tahun 2016, terbentuk pula kelompok ternak yang lain, yaitu kelompok ternak kambing bernama "Mekarsari", kelompok ternak burung bernama "Walisongo", kelompok ternak itik bernama "Konco Tani" dan kelompok perikanan bernama "Hamemayu". Tahun 2017 dibentuklah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang diberinama Kebon Wulangreh sebagai kandang terpadu kelima kelompok ternak yang menempati lahan kas desa seluas 6.225meter persegi. Pada tahun yang sama pula terbentuk lembaga keuangan mikro swadaya peternak bernama Bank Mikro SJA (Sahabat Joglo Alit). Tahun 2018, SPR membentuk kelompok wanita tani (KWT) yang diberinama KWT Dewi Lestari.

Penelitian Community Based Research (CBR) ini diharapkan memberikan penguatan terhadap pembangunan pedesaan endogen. Seiring dengan semangat pemberdayaan dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui serangkaian observasi dan program partisipatoris, CBR diharapkan mampu menjadi mitra pembangunan berdasarkan prinsip *mutual understanding* untuk mengawal proses-proses pembangunan endogen dan mendukung percepatannya secara optimal. Pembangunan endogen yang dilaksanakan secara mandiri di Karangdukuh sepatutnya tidak dibiarkan berjalan sendiri karena sejumlah hambatan dan keterbatasan lokal dalam bentuk dana, kapasitas sstruktur sosial, skill dan kultur masih membayangi.

CBR ini membatasi kajian pada model perencanaan partisipatoris dalam pembangunan pedesaan endogen, tahapan pelaksanaan serta uji petik terhadap hasil pembangunan pedesaan endogen. Mengingat pemerintah RI telah meratifikasi Sustainable Development Goal's (SDG's), maka isu pembangunan pedesaan endogen tidak bisa lepas dari tantangan keberlanjutan (*sustainability*). Untuk itu, CBR juga memproyeksikan keberlanjutan pembangunan pedesaan endogen di Desa Karangdukuh, yang saat ini berbasiskan peternakan rakyat.

Indikator Pembangunan Desa Endogen

Pembangunan desa mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah, khususnya setelah ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian ditidaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua peraturan ini menjadi dasar pentingnya pembangunan Indonesia yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu model pengukuran kemajuan pembangunan desa dan mencari beberapa faktor yang dapat membedakan tingkat kemajuan pembangunan antar desa.

Tahun 2001, Bappenas mengajukan sebuah model pengukuran pembangunan desa bernama Indeks Pembangunan Daerah (IPD) atau Regional Development Index (RDI) dengan 3 (tiga) indikator utama, yaitu: (i) Kapabilitas Pemerintah, (ii) Perkembangan Wilayah, dan (iii) Keberdayaan Masyarakat. Tahun 2015, Bappenas mempertajamnya Indeks Pembangunan Daerah (IPD) dengan konsep Indeks Pembangunan Desa (IPD) (Bappenas, 2014). Model IPD 2014 menekankan fungsi pemetaan berdasarkan potensi desa dan data administrasi wilayah dengan unit dasar desa, sementara Model IPD 2001 mengembangkan pemetaan dengan pendekatan Regional Development Index (RDI) seperti yang pernah pula diterapkan di Republik Rakyat China (RRC). Model pengukuran pembangunan desa yang pernah diterapkan di luar Indonesia, antara lain: (i) Indicators of Good Governance / IGG (Philippine Institute for Development Studies, 1999); (ii) Regional Attractiveness Index / RAI (Price-Waterhouse Cooper, 2001); (iii) Urban Governance Index / UGI (UN-HABITAT, 2002) dalam rangka Global Campaign on Urban Governance; (iv) Environmental Sustainability Index / ESI (Yale University, 2005); (v) Indicators of Sustainability Development / ISD (United Nations, 2007); dan (vi) Vulnerability and Resilience Index / VRI (Malta University, 2008).

Tahun 2015, Millenium Development Goal's (MDG's) berakhir dan berganti menuju Sustainable Development Goal's (SDG's). Isu keberlanjutan pembangunan meningkatkan perhatian pemerintah pada keseimbangan pencapaian tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep SDGs mempertimbangkan sejumlah isu krusial yang berpengaruh secara global, seperti deplesi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Masyarakat dunia semakin menghargai aspek budaya, sosial, religi dan kearifan lokal sebagai sebuah bentuk kesuksesan. Dengan slogan *no one left behind*, SDG's mempertimbangkan persoalan kebahagiaan ini. Pada tahun 2017, BPS merilis indeks kebahagiaan 2017 berdasarkan Pedoman Pencacahan Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2017.

CBR ini mengembangkan instrumen Indeks Pembangunan Desa Endogen (IPDE) dengan memodifikasi model dari Bappenas 2015. Modifikasi dimaksudkan untuk memperjelas kontribusi proses endogenisasi terhadap indeks pembangunan desa sehingga indikatornya perlu lebih berbasis komunitas di dalam desa dan rentang pengukuran dalam satu kwartal. IPDE mengukur dampak endogenisasi dengan membandingkan setelah dan sebelum aksi endogenisasi dilaksanakan. Komponen utama dari IPDE adalah pertumbuhan ekonomi desa, Angka Kebahagiaan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Endogenisasi Pembangunan Desa berbasis Peternakan Rakyat

Model pembangunan desa endogen mulai muncul di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang pada pertengahan tahun 1970-an (Yamamoto, 2007). Pembangunan endogen lebih mengharapkan komunitas lokal sebagai motor pembangunan dan potensi lokal sebagai inspirasi pembangunan (Massey, Dorean, 1984). Dengan begitu, pembangunan endogen mengintegrasikan proses ekonomi dan proses sosial (Arocena, Rodrigo and Sutz, J., 2014), dengan strategi pembangunan yang ditentukan sendiri dan partisipatif berbasiskan kebutuhan lokal dan penggunaan potensi-potensi endogen (Muhlighaus dan Walty, 2001). Lebih dari itu, pembangunan endogen sepenuhnya bersandar pada sumberdaya lokal, pengetahuan lokal, dan kepemimpinan lokal dengan keterbukaan untuk memadukan pengetahuan tradisional dan pengetahuan yang berasal dari luar. Segala upaya untuk memungkinkan, mempercepat dan memperbesar skala pembangunan desa endogen, dalam CBR ini disebut endogenisasi (endogenizing).

B. METODE PENELITIAN

1. Endogenisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Menghidupkan Warung Kelompok Wanita Tani (KWT) Dewi Lestari

Berdasarkan hasil diskusi dalam FGD 1, bersama dengan mahasiswa KKN Tematik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, CBR melaksanakan langkah-langkah untuk menghidupkan warung KWT ini dengan cara mempercantik taman warung dan melukis mural tembok warung, memasang instalasi listrik, menyediakan kelengkapan warung dan mencarikan sponshorship selama dua bulan pembukaan.

b. Pendampingan Sentra Peternakan Rakyat

Sejak awal berdirinya SPR, masing-masing kelompok masih fokus pada sisi produksi peternak. Masing-masing kelompok ternak berupaya meningkatkan produksi, namun belum terlihat langkah-langkah upaya untuk bergerak secara kelembagaan memenuhi aspek distribusi dari dunia peternakan. Tim KKN UIN Suka mengambil inisiatif untuk memasang banner jual beli di kandang terpadu Kambing. Sementara untuk penjualan kotoran kambing dipanggilkan pedagang benih tanaman dari Prambanan.

c. Pendampingan Bank Mikro Sahabat Joglo Alit

Sejak tahun 2017, peternak dan petani di Karangdukuh telah memiliki LKM mandiri yang bernama Bank Mikro Sahabat Joglo Alit (SJA). Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang, dan asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, Bank Mikro SJA juga beroperasi dengan menyediakan jasa-jasa keuangan seperti dimaksud. Hanya saja, dalam memberikan layanan keuangan, bank ini beroperasi tanpa agunan dan tanpa bunga. Modus yang dilakukan Bank Mikro SJA seperti ini lazim dilakukan LKM pada umumnya dengan prinsip utamanya memberikan definisi bersama pada status transaksi agar anggota-anggota pasar memiliki tanggung jawab, penuh semangat, dan inovatif dalam menggerakkan perekonomian (Meagher, 2002). Tujuan Bank Mikro SJA adalah menyediakan akses keuangan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah dan juga rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan, terutama yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan.

Bank Mikro SJA ini tidak berorientasi pada profit. Tidak ada penanam modal di balik operasi Bank Mikro SJA ini. Modal diperoleh pengelola dari usaha mandiri yang dilakukan para peternak secara sukarela. Pada saat idul adha, masyarakat berkumpul di Pesantren Joglo Alit dan mereka mengkoordinir diri untuk melayani permintaan menjagal sapi atau kambing binatang kurban dari berbagai masjid. Dana yang mereka peroleh dari menjagal binatang kurban dikumpulkan untuk penguatan modal Bank Mikro SJA.

Pendampingan yang dilakukan melalui penelitian CBR ini adalah memberikan tenaga tambahan dan armada dari mahasiswa tim KKN UIN Sunan Kalijaga. Kurban merupakan momentum bagi peternak untuk menggali fundraising sehingga relawan dan armada menjadi sangat berharga pada momen penting tersebut.

2. Endogenisasi Ruang Terbuka Masyarakat

Ruang publik adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan bentuk ruang yang sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan (Hakim, Rustam, 1987). Ruang publik menandai adanya keterlibatan pasif (*passive engagement*) dan aktif (*active engagement*) dalam pemanfaatan ruang bersama sehingga para pengguna ruang publik dapat melakukan interaksi dengan cara yang berbeda. Ruang sebagai wadah harus mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi terpenuhinya syarat interaksi, yaitu memberi peluang bagi terjadinya kontak dan komunikasi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dalam bentuk aktivitas yang pasif seperti sekedar duduk menikmati suasana atau mengamati situasi dan dapat pula terjadi secara aktif dengan berbincang bersama orang lain membicarakan suatu topik atau bahkan melakukan kegiatan bersama (Carmona, 2003).

Berpijak pada pemetaan pembangunan endogen pada FGD₂, penelitian ini melakukan langkah endogenisasi ruang publik terbuka untuk masyarakat desa Karangdukuh. Emperan di depan Cakruk Pintar Kalijaga diusulkan dikembangkan menjadi ruang publik yang kelak akan digunakan untuk kalangan anak-anak, remaja, orang tua. Berdasarkan usulan yang mengemuka di FGD 2, kehadiran ruang publik diperlukan setidaknya oleh karena beberapa hal berikut: Pertama, berbagai kegiatan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat memerlukan ruang publik bersama. Kedua, kesadaran akan mitigasi memerlukan adanya titik kumpul untuk evakuasi dalam situasi-situasi yang bersifat darurat kebencanaan. Dan ketiga, masyarakat memerlukan ruang publik bersama yang mendukung program Kota Layak Anak (KLA). Sedang secara spesifik, para peternak di lingkungan SPR berharap keberadaan ruang publik tersebut berguna juga untuk menyemarakkan penjualan ternak mereka.

FGD₁ & FGD₂ telah mengelaborasi desain ruang, lanskap dan karakteristik ruang publik masyarakat. Kajian lebih mendalam mengenai desain bangunan dilakukan dengan mewawancarai sejumlah tokoh masyarakat untuk selanjutnya mencari perusahaan penyedia yang sanggup mewujudkan kebutuhan masyarakat akan ruang publik. Perancang, umumnya lebih menekankan pentingnya *activity setting*. Sementara pemakai lebih mempertimbangkan siapa saja orang yang memakai fasilitas itu, atau dengan siapa mereka akan bersosialisasi dalam penggunaan fasilitas tersebut (Randolph T. Hester, 2010). Dalam masyarakat desa yang pluralis, arsitek dituntut untuk mengenali berbagai konflik dan mampu membuat desain tanggap sosial. Dalam usaha mengartikulasikan nilai-nilai sosial dan humanis maka berkembanglah studi perilaku lingkungan yang mempelajari lebih khusus yaitu interaksi antara perilaku manusia dengan lingkungan fisiknya (Charles Jencks (1971)).

Desain pilihan adalah ruang publik dengan titik kumpul berupa pendopo Joglo yang diletakkan di depan dan menyatu dengan Cakruk Pintar Kalijaga. Joglo merupakan salah satu bangunan adat dengan langgam arsitektur tradisional di Jawa Tengah. Lazimnya joglo memiliki kerangka berupa struktur utama dan struktur penyangga. Struktur utama terdiri atas 4 tiang pokok yang biasa disebut soko guru dengan diameter kayu berbanding lurus dengan bentangan ruang antar tiang. Sedangkan struktur penyangga berupa balokan kayu yang disusun di atas soko guru untuk menopang bagian pengatapan, lazim disebut tumpangsari. Bagian atas Joglo ditutup dengan genting dengan kerpus tanah guna menutup garis-garis pertemuan antar sisi atap. Dengan menyatunya joglo dengan bagian cakruk pintar, maka tata ruang joglo ini terbagi atas tiga ruang; pendopo, pringgitan dan dalem. Pendopo adalah ruang pertemuan yang letaknya tepat di bawah soko guru. Pringgitan adalah ruang tengah yang digunakan untuk menata buku, tempat penyimpanan alat bermain dan pusat instalasi internet. Sedangkan, dalem dalam konsep masyarakat jawa merupakan ruang keluarga yang tidak diperbolehkan

untuk masyarakat umum. Namun ketika difungsikan sebagai ruang publik, ruang dalam berfungsi sebagai dapur, kamar mandi dan tempat penataan logistik pertemuan.

3. Endogenisasi Rumah Literasi Masyarakat

Tahun 2016, pemerintah mencanangkan Program Literasi Nasional (GLN). Program ini merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang membawa pesan kuat bahwa pemerintah negara Indonesia berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini segera diikuti oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Perpustakaan yang ada di setiap kota dan kabupaten tumbuh berkembang menyediakan berbagai sumber bacaan bagi masyarakat. Untuk menjangkau sejumlah kawasan yang masih terkendala akses transportasi, pemerintah memfasilitasi dengan model perpustakaan keliling dalam bentuk mobil-mobil kecil yang difungsikan sebagai rumah baca.

Tahun 2018, SPR bekerjasama dengan KKN UGM dan KKN UIN Sunan Kalijaga telah mendirikan sebuah rumah literasi di lokasi SPR. Ini adalah satu-satunya rumah literasi yang ada di Desa Karangdukuh. Direncanakan rumah literasi ini akan dimanfaatkan sebagai perpustakaan desa yang menyediakan beragam sumber bacaan bagi masyarakat luas. Pada bulan agustus 2018, perpustakaan desa ini diresmikan Kepala Desa dengan nama Cakruk Pintar. Karena keterbatasan dana, saat itu penyediaan buku-buku masih pinjam dari bacaan yang tersedia di Pesantren Joglo Alit. Cakruk Pintar saat itu baru difungsikan sebagai tempat bermain anak-anak usia dini.

Tahun 2019, setelah melakukan FGD₁, tim KKN UIN Sunan Kalijaga mempercantik Cakruk Pintar dengan lukisan mural di seluruh tembok Cakruk. Atas ijin dari warga setempat, nama cakruk pintar kemudian ditambah menjadi Cakruk Pintar Kalijaga.

Penelitian melakukan endogenisasi rumah literasi dengan membangkitkan gairah literasi digital yang telah tumbuh berkembang di kalangan masyarakat desa Karangdukuh. Di desa ini telah ada Pesantren Joglo Alit yang juga telah menyediakan fasilitas internet gratis bagi kalangan muda Karangdukuh. Karena letaknya yang lebih dekat pada dukuh Brajan, mayoritas pemakai fasilitas internet di Pesantren Joglo Alit adalah muda-mudi Dukuh Brajan. Nampaknya, masih terdapat sekat psikologis antar pemuda dukuh Karangdukuh dan dukuh Brajan sehingga aspirasi yang menguat pada FGD₁ dan FGD₂ mengharapkan agar tersedia fasilitas internet untuk dukuh Karangdukuh. Atas dasar aspirasi ini, maka penelitian CBR mempertimbangkan pengadaan tower internet dan instalasi wifi di Cakruk Pintar Kalijaga.

Pengadaan tower internet dan instalasi wifi dipercayakan pada CV. Orion. Pertimbangan dari sejumlah tokoh masyarakat menghendaki agar dikemudian hari cita-cita desa digital dikembangkan dengan menggunakan satu jaringan terpadu dengan bekerjasama dengan satu provider. Tower antena internet dipasang di barat Pendopo Cakruk Pintar Kalijaga. Sementara untuk reuters ditempatkan di 2 titik; warung KWT dan ruang pringgitan Cakruk Pintar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Petik Endogenisasi Pembangunan Desa Berbasis Peternakan Rakyat

1. Uji Petik Pertumbuhan Ekonomi

Uji petik pertumbuhan ekonomi dilaksanakan untuk memberikan gambaran adanya perubahan pendapatan komunitas pada suatu kwartal tertentu. Kwartal berjalan (Y) dipertimbangkan dari bulan September – Desember, sementara Kwartal Sebelumnya (Y-1) dipertimbangkan dari bulan Mei-

Agustus. Pendapatan yang diukur bersifat sektoral berdasarkan *mode of production* satuan komunitas. Ada 5 kelompok ternak dan 1 kelompok wanita tani yang dipertimbangkan sebagai satuan komunitas produksi di lingkungan SPR Kebon Wulangreh. Distribusi pendapatan pada masing-masing terbagi atas pendapatan pribadi dan pendapatan kelompok.

Secara keseluruhan, Uji Petik ini menggambarkan perputaran uang yang beredar di kalangan peternakan rakyat. Pada Quartal Kedua 2019, perputaran uang mencapai Rp 575.578.000,-. Sedangkan pada Quartal ketiga 2019, perputaran uang melonjak menjadi Rp 713,518,000,-. Lonjakan tersebut mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi berdasarkan pendapatan domestik bruto (PDB) sektor produksi sebesar 24 %.

Tabel 1 04.01
PDB Sektor Produksi

	Q3	Q2	PE
T1	112,100,000	84,710,000	0.32
T2	434,800,000	393,200,000	0.11
T3	65,718,000	31,068,000	1.12
T4	37,000,000	29,100,000	0.27
T5	25,400,000	14,300,000	0.78
T6	38,500,000	23,200,000	0.66
	713,518,000	575,578,000	0.24

Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan pada komunitas SPR masih relatif rendah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kelompok Ternak Itik, namun tidak dibarengi oleh kelompok-kelompok ternak yang lain dan jumlah peternaknya hanya 7 orang. Endogenisasi yang dilakukan melalui penelitian CBR ini dengan demikian belum optimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi komunitas SPR secara merata. Hal ini mengingat endogenisasi masih bertumpu pada warung KWT yang merombak mode kerja KWT dari sektor produksi menuju sektor distribusi (niaga). Pertumbuhan tipis pada kelompok kambing dan itik hanya efek imbas saja dari dibukanya warung KWT, dan belum bisa disebut dampak langsung dari KWT.

Akumulasi indeks pertumbuhan ekonomi dalam kwartal ketiga berdasarkan pertambahan pendapatan sebesar 24%. Pertumbuhan ini dimungkinkan karena bertambahnya alat produksi yang telah difungsikan berupa kandang pada kelompok ternak kambing, kelompok ternak itik dan berupa warung KWT kelompok wanita tani. Sementara kandang terpadu burung yang dibangun dengan APBDes 2018 belum dioperasikan sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan pendapatan peternak burung. Demikian juga kolam ikan yang juga dibangun pemerintah desa dengan APBDes 2018 belum juga dioperasikan sehingga belum berdampak pada pertumbuhan pendapatan peternak.

Temuan lain dalam bidang ekonomi, yaitu optimalnya pemanfaatan lembaga keuangan masyarakat yang ada, yaitu Bank Mikro Sahabat Joglo Alit (SJA) dan Dana Ternak dari RW 08. Bank Mikro menyediakan kredit mikro untuk para peternak, petani dan UMKM di Dukuh Karangdukuh tanpa bunga dan tanpa agunan. Sedangkan Dana Ternak RW 08 dikucurkan dengan pola gaduhan, atau bagi hasil dengan peternak. Pada akhir tahun 2019, kedua lembaga keuangan mikro tersebut melaporkan bahwa dana mereka terserap secara optimal 100% kepada masyarakat. Bahkan untuk Bank Mikro, tercatat talangan dari donatur ketika permintaan pinjaman melampaui kas Bank Mikro.

2. Uji Petik Ruang Publik Bersama

Mengikuti SDG's, uji petik ruang publik bersama dilaksanakan dengan mengukur indeks kebahagiaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, indeks kebahagiaan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2014 dan 2017. Pada tahun 2014 sebesar 68,28 dan meningkat menjadi 70,69 pada tahun 2017. Indeks Kebahagiaan Indonesia ini disusun oleh tiga dimensi yaitu Kepuasan Hidup, Perasaan dan Makna Hidup.

Tabel 2. 04.02
Indeks Angka Kebahagiaan

Dimensi	Subdimensi	Indikator	Penimbang	Q2	Q3
Kepuasan Hidup (34,80)	Kepuasan Hidup Personal (50,00)	Pendidikan dan Ketrampilan	18.34	3.2191285	3.21867
		Pekerjaan/Usaha/Kegiatan Utama	21.67	3.917936	3.918478
		Pendapatan Rumah Tangga	22.81	4.2780155	4.400049
		Kesehatan	17.04	3.138342	3.127692
		Kondisi Rumah dan Fasilitas Rumah	20.14	3.632249	3.651886
	Kepuasan Hidup Sosial (50,00)	Keharmonisan Keluarga	19.41	3.41761575	3.419072
		Ketersediaan Waktu Luang	18.93	3.706494	3.704601
		Hubungan Sosial	22.13	4.48409125	4.445917
		Keadaan Lingkungan	20.64	4.292604	4.306536
		Kondisi Keamanan	18.89	3.83797575	3.84931
Perasaan (31,18)	Perasaan Senang/Riang/Gembira	25.86	5.518524	4.5533	
	Perasaan Tidak Khawatir/Cemas	36.8	7.6222	6.59272	
	Perasaan Tidak Tertekan	37.34	6.713732	6.374872	
	Kemandirian	16.56	3.009366	3.012264	
	Penguasaan Lingkungan	18.44	3.480089	3.568601	
Makna Hidup (34,02)	Pengembangan Diri	15.27	3.15745425	3.151728	
	Hubungan Positif dengan Orang Lain	15.48	2.723319	2.719062	
	Tujuan Hidup	17.48	3.307216	3.296728	
	Penerimaan Diri	16.78	3.169742	3.126114	
	Angka Kebahagiaan Kwartal Ketiga			76.626094	74.4376

Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kebahagiaan sebesar 2,9 % bersumber pada dimensi perasaan. Banyak hal yang pada Kwartal III ini menimbulkan perasaan cemas, kurang senang dan tertekan, terutama akibat dari menghangatnya hubungan dengan Kepala Desa Karangdukuh yang baru. Pembicaraan dengan Kades dalam forum-forum informal mendatangkan kekecewaan bahkan kecemasan di kalangan peternak. Kades sering menyampaikan bahwa pemerintah desa mendapatkan desakan dari dukuh-dukuh lain yang menyampaikan keberatan atas keberadaan SPR. Alih-alih membangun jembatan komunikasi untuk membangun kesepahaman bersama antar dukuh, Kades dianggap peternak justru memperuncing kesenjangan komunikasi. Para peternak merasa dibohongi oleh kades dalam sejumlah pertemuan berantai. Komunikasi yang dibangun oleh Kades malah memperuncing antar faksi dan saling menimbulkan ketidakpercayaan. Apalagi Kades sering mengaitkan dengan persoalan dukungan saat pilkades.

Komunikasi peternak dengan pemerintah desa di bawah Kades Baru terbilang rusak. Dari bulan September – Desember 2019, ketua SPR telah mendapatkan 1 kali surat panggilan dan 3 kali surat peringatan dari Kades. Dampaknya menimbulkan keresahan, ketidakpastian hukum dan meningkatnya kecemburuan dukuh lain terhadap komunitas peternakan rakyat.

3. Uji Petik Rumah Literasi Masyarakat

Uji petik Rumah literasi masyarakat diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Tiga indikator yang digunakan dalam IPM adalah Indeks kesehatan, Indeks pendidikan dan Indeks Pengeluaran. IPM merupakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Uji petik selanjutnya membandingkan IPM pada kwartal kedua sebagai Y-1 dengan IPM pada Kwartal ketiga sebagai Y.

Untuk mendapatkan nilai IPM Komunitas, maka diperlukan acuan daerah setempat. Untuk itu, penelitian ini mengacu pada nilai IPM Kabupaten Klaten dalam Indeks Pembangunan Manusia 2018 yang diterbitkan BPS 2018 (IPM 2018) Berikut acuan tersebut :

Tabel 3. 04.06
IPM Kabupaten Klaten 2018 sebagai Acuan

	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM
Klaten	76.67	13.13	8.24	11,738	74.79

Dengan mengacu pada nilai IPM Kabupaten Klaten, maka IPM komunitas pada kwartal kedua (Y-1) sebesar 59,13. Sementara IPM pada kwartal ketiga (Y) sebesar 60,17. Berdasarkan perhitungan, pertumbuhan IPM komunitas mencapai 1,76 %. Situasi pembeda pada kwartal kedua dan ketiga yang terjadi hampir pada semua variabel, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

Tabel 4. 04.07
IPM Komunitas pada Kwartal II

Komponen	Klaten	Min	Max	Indeks
I kes	76.67	43.39	77.23	0.9834515
I pend	13.13	10.25	16.68	0.4479005
	8.24	4.31	12.39	0.4863861
				0.4671433
I peng	11,738	7,849	16,490	0.4500637
IPM Komunitas pada Kwartal II				59.132423

Perubahan pada indeks kesehatan lebih disebabkan karena turunnya Angka Harapan Hidup minimum. Sedang perubahan indeks pendidikan terjadi perubahan harapan lulus sekolah dan rata-rata lulus sekolah. Pada kwartal kedua, terjadi kelulusan sekolah pada sejumlah putra-putri masyarakat Karangdukuh. Dan pada kwartal ketiga, terdeteksi bahwa yang melanjutkan sekolah sebesar. Adapun perubahan indeks pengeluaran lebih turunnya pengeluaran maksimal. Pada Kwartal kedua, pengeluaran membesar karena pengaruh lebaran. Sementara pengeluaran kwartal kedua lebih banyak dipengaruhi faktor biaya sekolah.

Tabel 5. 04.07
IPM Komunitas Pada Kwartal III

Komponen	Klaten	Min	Max	Indeks
I kes	76.67	43.41	77.23	0.9834418
I pend	13.13	10.26	16.67	0.4477379
	8.24	4.32	12.41	0.4845488
				0.4661434
I peng	11,738	7,850	16,460	0.4753461
IPM Komunitas pada Kwartal III				60.176376

IPM menjadi terasa banal dalam uji petik literasi masyarakat. Hal ini mengingat indikator IPM adalah indeks pendidikan berbasis sekolah sementara pembangunan budaya literasi di masyarakat memilih capaian di luar angka harapan lulus dan rerata lulus sekolah. Sayangnya, IPM ini yang diakui dan diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990 dan laporannya dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Dengan demikian, cukup sulit untuk mengabaikan IPM sebagai indikator yang diperhitungkan setidaknya nasional dan daerah.

Di lapangan dapat teramati bahwa budaya literasi mulai tumbuh di kalangan masyarakat Karangdukuh sejak dibukanya rumah literasi masyarakat yang diberinama Cakruk Pintar Kalijaga. Bagi muda-mudi Karangdukuh, Cakruk Pintar merupakan rumah literasi kedua setelah pesantren Joglo Alit. Kendatipun buku bacaan masih terbatas, namun kunjungan anak-anak dan remaja Karangdukuh ke tempat ini cukup menggembirakan. Kunjungan paling banyak terjadi pada hari Sabtu dan hari Minggu. Bahkan ini memunculkan minat literasi generasi yang lebih muda (remaja) daripada muda-mudi generasi sebelumnya yang tergabung dalam UBN. Data dari CV.Orion yang menjadi penyedia fasilitas internet di rumah literasi tersebut, menunjukkan bahwa lalu lintas data terpadat terjadi pada hari Sabtu dan Ahad.

Proyeksi Keberlanjutan Pembangunan Endogen

Dalam kasus pembangunan desa endogen berbasis peternakan rakyat di Desa Karangdukuh, penelitian CBR menemukan sejumlah gejala pelemahan endogenisasi dalam bentuk sebagai berikut :

1. Kecemburuan Sosial

Ketiadaan wadah dan wahana komunikasi lintas dukuh, memicu persoalan ketika pola pemberdayaan masyarakat digeser dari pola individual menuju pemberdayaan kelompok. Perubahan strategi dimulai oleh Kades Iriyanto pada tahun 2015. Karena tidak meratanya sumberdaya, maka Kelompok Ternak dibentuk secara legal untuk memayungi seluruh peternak di Desa Karangdukuh sesuai dengan kluster masing-masing. Pusat pemberdayaan di tempatkan di SPR Kebon Wulang Reh. Tanpa wadah komunikasi lintas dukuh, SPR tidak mampu mensosialisasikan strategi pemberdayaan tersebut. Beberapa kali undangan yang digelar oleh SPR memang berhasil menghadirkan ketua-ketua RW setempat. Namun sosialisasi RW ke masyarakat nampaknya belum maksimal. Di sinilah kecemburuan dimunculkan oleh pihak-pihak yang memang menentang strategi pemberdayaan tersebut.

Tahun 2019 terjadi pergantian Kades, sementara Kades lama tidak mencalonkan diri. Kades baru menyatakan mendapat desakan sejumlah warga untuk mencabut hak kelola lahan kas desa yang ditempati SPR. Sementara, mereka yang mendesak mengkonsolidasi para peternak di luar SPT dan

mulai memberlakukan iuran kepada para peternak yang bergabung di kelompoknya. Disinilah pola-pola kecemburuan diproduksi sehingga menjadi bersifat lintas dukuh. Di sisi lain, pemerintah desa hanya menyediakan pertemuan-pertemuan formal yang kering, tergesa dan kurang aspiratif. Tanpa adanya wadah bersama, kecemburuan sosial semacam ini akan terus diproduksi dan direproduksi sehingga melemahkan pembangunan desa endogen yang telah berjalan dengan basis peternakan rakyat.

2. Kaburnya Kepastian Hukum

Tahun 2016 Pemerintah Desa Karangdukuh telah membentuk kelompok-kelompok ternak modern yang berbadanhukum sesuai SK Kemenkumham dan didampingi langsung oleh penyuluh dari kecamatan. (Rintisan dimulai dari tahun 2015). Untuk kepentingan inseminasi, diperlukan penguatan dalam bentuk dukungan Kandang terpadu sehingga terbitlah Peraturan Desa Karangdukuh Nomor 4 Tahun 2016 yang berisikan pengelolaan lahan kas desa nomor persil 61 untuk kandang terpadu bagi pengembangan peternakan rakyat. Turut mendampingi terbitnya perdes tersebut Camat Jogonalan (Saat itu Bapak Agus Salim), pendamping desa (dari Kec.Jogonalan), Dandim 0723/Klaten (Saat itu Bapak Bayu Jagad) dan Fakultas Peternakan UGM. Perdes tersebut berlaku per tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya, untuk kepentingan pengelolaan Kandang terpadu, pemerintah desa membentuk Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kebon Wulang Reh sebagai asosiasi profesi yang menampung aspirasi kelompok-kelompok ternak melalui surat nomor 470/001/31.8/10 tertanggal 9 Januari 2017.

Hingga awal tahun 2019, peternak menikmati jaminan hukum melalui perdes, dana pemberdayaan masyarakat yang ada di APBDes dan asosiasi kelompok ternak yang disebut Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kebon Wulangreh. Dengan kepastian hukum tersebut, SPR membuka Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten. SPR juga membuka kerjasama dengan sejumlah kampus kenamaan, seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. SPR juga didampingi oleh 3 penyuluh dari kecamatan: penyuluh peternakan, penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan.

Situasi mulai berubah ketika Kades baru berkeluh kesah kepada peternak bahwa dirinya didesak oleh sebagian masyarakat. Kades juga mengeluhkan bahwa dalam pemerintahan desa, muncul klik-klik antar kelompok. Mulailah Kades menyampaikan tawaran-tawaran sumir yang bertabrakan dengan payung hukum yang ada. Kades menawarkan agar aset SPR ditaksir lalu dimasukkan dalam saham BUMDES. Kades memberikan harapan, kendatipun tidak diundang dalam musrenbangdes, kades berjanji akan memberikan formulir pengusulan anggaran. Menjanjikan akan mengundang SPR sebagai narasumber untuk menjelaskan duduk perkara dari SPR kepada masyarakat luas. Begitu pula dengan meminta mengumumkan 4 program desa yang justru dianulir kembali oleh pemerintah desa.

Puncaknya adalah pada rapat musdes 17 September 2019, kelompok ternak dihadirkan namun dalam pengambilan keputusan oleh RW-RW. SPR dan kelompok ternak diposisikan tidak memiliki hak suara/hak pilih. Saat suara dikembalikan pada 9 RW, semua menyetujui bahwa perdes disempurnakan. Namun Kades justru membuat keputusan yang mengejutkan, yaitu memasukkan klausul bahwa SPR diambil alih oleh pemerintah desa. Esoknya, Kades di laman facebooknya menyatakan bahwa bangunan-bangunan yang dibangun oleh SPR sebagai bangunan liar. Pada bulan november 2019, kades menolak permintaan keterangan atas status perpustakaan desa yang diajukan ketua RW 08. Keterangan tersebut diperlukan untuk mengajukan migrasi rekening listrik Perpustakaan Desa Cakruk Pintar dari rekening pribadi menuju rekening sosial. Petugas PLN sudah melakukan survei, namun meminta surat keterangan dari Pemerintah Desa mengenai status perpustakaan desa.

Kades menolak memberikan keterangan dan enggan pula menuliskan surat keterangan penolakan keterangan. Sampai kini, status rekening perpustakaan desa tetap rekening pribadi atas nama Pak Taat Subarkah (Ketua RW 08).

Hingga akhir tahun 2019, belum terbit perdes pengganti perdes lama. Ketidakpastian hukum ini membuat masyarakat gundah. Demikian juga calon investor yang telah digandeng oleh kelompok ternak itik, menyatakan hengkang karena ketidakpastian hukum yang ada. Sangat disayangkan, pihak kecamatan gagal menjembatani komunikasi antara SPR dengan pemerintah desa dan membiarkan keduanya berkonfrontasi. Alih-alih mendudukkan masalah secara hukum, pihak kecamatan justru dirasa cuci tangan atas keberlanjutan SPR Kebon Wulangreh. Saat ini, SPR Kebon Wulangreh didampingi oleh KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kabupaten Klaten untuk berkomunikasi dengan instansi terkait.

3. Domestifikasi Sektor Peternakan & Pertanian

Pola domestifikasi sektor peternakan dan pertanian nampaknya terpengaruh tradisi masyarakat agraris lama di mana semua yang membantu sektor pertanian dan peternakan disebut Konco Wingking (teman belakang). Tradisi domestifikasi sektor pertanian dan peternakan yang tadinya bersifat kultural dan soft, selanjutnya mengalami penajaman di era kolonial sehingga berkesan bengis dan kurang manusiawi. Clifford Geertz mendeskripsikan perkembangan penggunaan lahan di Indonesia pada masa kononial Belanda dari abad ke-7 hingga abad ke-20. Sistem tanam paksa yang dikembangkan Belanda tidak berhasil mendorong pertanian Indonesia. Sebaliknya, pertanian Indonesia justru mengalami involusi sehingga menjadikan pertanian hanya sebagai tempat penampungan penduduk yang terus bertambah serta kemiskinan yang dibagi rata (shared poverty).

Ketika berada dalam kehidupan negara modern, pola domestifikasi masih tertanam kuat di kalangan masyarakat desa dan aparat pemerintah. Pemberdayaan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sementara ini masih menempatkan sektor ini sebagai proses domestik. Subsidi yang diberikan untuk kelompok tani dan kelompok ternak, masih berupa penguatan sisi produksi dan relatif belum optimal menyentuh sektor distribusi. Pihak penyuluh kerap kali membagikan benih, pupuk dan alat produksi seperti alat penanam padi, gembor (alat untuk menyiram), traktor dan alat penuai padi.

Upaya mendampingi petani untuk mulai keluar dari domestifikasi ini dilaksanakan oleh KKN UGM pada tahun 2018. Kala itu seorang tim KKN UGM mengembangkan pengolahan kripik lele dan selanjutnya ibu-ibu KWT Dewi Lestari memproduksi kripik lele yang dihasilkan kelompok ternak ikan. Kegiatan ini tidak hanya berhenti pada sisi produksi, karena selanjutnya oleh Ibu-ibu KWT produk kripik lele tersebut dipasarkan bersama dengan dengan sistem retail dan grosir. Ibu-ibu KWT mulai merambah sisi niaga.

Pada tahun 2019, tim KKN tematik BUMDES UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghidupkan warung KWT, di sebelah timur SPR. Sejumlah komoditas ibu-ibu KWT seperti kacang panjang, cabe dipasarkan di sana, disamping juga warung menyediakan minuman dan makanan. Secara perorangan ibu-ibu juga menitipkan dagangan ke Warung KWT. Hal ini berefek juga pada kelompok-kelompok ternak lainnya. Kelompok ternak kambing mulai menyediakan jasa penyembelihan kambing baik untuk aqiqah, kurban dan lain sebagainya. Kotoran kambing juga sudah mulai dipasarkan. Sedang pada kelompok ternak itik, dahulu penjualan terbatas pada bebek/itik dan telur. Saat ini Yatin, salah seorang peternak itik sudah biasa melayani pesanan masakan ingkung bebek.

Upaya keluar dari domestifikasi sektor pertanian dan peternakan, selanjutnya ditopang oleh Lembaga Keuangan Mikro yang disebut Bank Mikro SJA (Sahabat Joglo Alit). Meskipun namanya

Bank Mikro, lembaga ini memberikan layanan keuangan untuk peternak dan petani dengan tanpa agunan dan tanpa bunga. Modal didapat dari pelayanan yang diberikan relawan pada hari idul adha dan hari tasriq. Dalam satu even hari raya idul adha, relawan bisa melayani 10 hingga 15 masjid tergantung jumlah kru yang saat itu siap. Kendatipun tidak mematok harga jasa yang baku, para relawan lalu mendapatkan dana dari usaha tersebut. Dana itu dikumpulkan dan dijadikan sebagai modal bank mikro. Dengan sirkulasi dana demikian, diharapkan petani dan peternak mampu keluar dari domestifikasi sektor pertanian dan peternakan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diperoleh sejumlah kesimpulan berikut :

1. Model Perencanaan Pembangunan Desa Endogen dikembangkan dengan cara mengelaborasi sumber daya desa.
2. Pelaksanaan pembangunan desa endogen dilaksanakan dengan strategi endogenisasi. penelitian melaksanakan 3 bentuk endogenisasi, yaitu: endogenisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, endogenisasi ruang publik bersama, dan endogenisasi rumah literasi masyarakat. Ketiganya di laksanakan di Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kebon Wulangreh
3. Uji petik terhadap pembangunan desa endogen menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 24 %, Indeks kebahagiaan turun sebesar 2,9% dan IPM tumbuh 1,76 %.
4. Proyeksi keberlanjutan atas Pembangunan Desa Endogen menunjukkan gejala pelemahan terhadap proses endogenisasi yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kecemburuan sosial, kaburnya kepastian hukum dan tradisi domestifikasi sektor pertanian dan peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agere, S., 2000, *Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives*, London: Commonwealth Secretariat.
- Ancok, D., 2002, *Teknik Pengukuran Skala Pengukur*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Angga, D., 2006, *Kemitraan Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta Dalam Pembangunan (Suatu Studi Tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan di Kabupaten Pasuruan)*, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 4, No. 3, hal. 305- 402.
- Annual Report Asian Development Bank (ADB), 2000.
- APHSA, 2011, *A Guidebook for Building Organizational Effectiveness Capacity: A Training System Example*, New York: American Public Human Service Association.
- Arikunto, S., 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arocena, Rodrigo and Sutz, J., 2014, *Innovation and democratisation of knowledge as a contribution to inclusive development*. In *National Innovation Systems, Social Inclusion and Development. The Latin American Experience*, edited by G. Dutrenit and J. Sutz, 15-33. Cheltenham: Edward Elgar.
- Armistead, C, and Pettigrew, P., 2004, "Effective partnerships: building a subregional network of reflective practitioners", *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 17, Iss: 7, pp. 571 – 585
- Arsyad, Lincoln., 2001, *Peramalan Bisnis Edisi Pertama*, BPFE: Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln., 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asian Development Bank Institution, 2000, *Public Private Partnerships in the Social Sector- Issues and Country Experiences in Asia and the Pacific in*, ABDI Policy Paper, No. 1, p. 42.
- Azwar, S., 2009, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagchi, P.K. and Paik, S.K., 2001, "The Role of Public-Private Partnership in Port Information Systems Development", *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 14 Iss: 6, pp.482-499.
- Balitbang Depdagri, 1991, *Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Nyata dan Bertanggungjawab*. Jakarta: Balitbang Depdagri.
- Balley, K.D., 1978, *Methods of Social Research*. New York: The Free Press, A. Division of Mamillan Publishing Co.Inc.
- Beckwith, D, and Lopez, C., 1997. "Community Organizing: People Power from the Grassroots." COMM-ORG Working Papers Series, 1997 Working Papers. <http://commorg.utoledo.edu/papers.htm>
- Beltran S., L.R. 1975. *Research Ideologies in Conflict*. "Journal of Communications, 25."
- Bhandari, B. B., 2003. *Participatory Rural Appraisal*. In: Kanagawa, Japan: Institute for Global Environmental Strategies (IGES), p. Module 4.
- Boeke, J.H., 1983, *Prakapitalisme di Asia*; penerjemah, D. Projosiswoyo, Jakarta : Sinar Harapan
- Carmona, 2003, *"Public Space Urban Space" The Dimention of Urban Design*. London: Architectural Press London
- Castleman, Kenneth R., 2004, *Digital Image Processing*, Vol. 1, Ed.2, Prentice Hall, New Jersey.
- Chamber, Robert., 1988, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Jakarta, LP3ES.
- Chevalier, J.M. and Buckles, D.J., 2008, *SAS2: A Guide to Collaborative Inquiry and Social Engagement*. Sage India and IDRC, Ottawa and New Delhi.
- Christopher Ray, *Culture Economies : A Perspective on Local Rural Development in Europe*, Center for Rural Economy, 2001, 1997.

- Frank Vanclay, *Endogenous Rural Development from a Sociological Perspective*. Robert Simson; Stough, Roger R dan Peter Nijkamp (Editors). *Endogenous Regional Development :Perspective, Measurement and Empirical Investigation*. Edward Elgar, Cheltenham UK. 2011
- Geladi P, Kowalski BR. 1986. *Partial least squares regression: A tutorial*. *Analitycal Chimica Acta*. 185:1-17
- Gibberd, Frederick., 1972, *Composition Urbaine*, Dunod:Paris.
- Hakim, Rustam., 1987, *Unsur Perancangan Dalam Arsitektur Lansekap*. Jakarta.
- Hester, Randolph T., 2010, *Design for Ecological Democracy*, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Howard Gardner (1991), *The Unshooled Mind : How children think and how school should teach*. New York, Harper Collins.
- Inayatullah, 1967, *Toward a Non-Western Model of Development*, In Lerner, D., and Schramm, W. (eds): *Communication and Change in the Developing Countries*, Honolulu:East-West Center Press.
- Jencks, Charles., 1971, *Architecture 2000, Prediction and Methods*, New York.
- Lowe, P. , C. Ray, N. Ward, D. Wood, R. Woodward, 1998, *Participation in rural development: A review of European experience* Centre for rural economy research report, Newcastle University.
- Massey, Doreen., 1984, *Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production*, Macmillan: London.
- McQuail, Denis., (editor), 2002, *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, SAGE Publications.
- North, Douglas C. , 1990, *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- North, Douglas C., 1994, *Economic Performance through Time*. *American Economic Review*, 84, pp. 359-68.
- Pantoro, Setyo., 2008, *Pendekatan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Implikasinya*. Jakarta: Kompas.
- Salazar-Xirinachs, José Manuel; Nübler, Irmgard; Kozul-Wright, Richard, 2014, *TRANSFORMING ECONOMIES Making industrial policy work for growth, jobs and development*, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE · GENEVA P.113-150.
- Salikin, Karwan A., 2003, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan., 2012, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS (Edisi Pertama)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Scruton, Roger., 1984, *Public Space and The Classical Vernacular*. Singapore.
- Scurton, Roger., 1984, *The Meaning of Conservatism*, MacMillan Publisher.
- Stimson, Robert J., Stough, Roger R., Roberts, Brian H., 2006. *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategi*. Second Edition. Australia: Springer.
- Supranto, J., 2004, *Analisis Multivariat: Arti dan interpretasi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Tim Subdirektorat Analisis Statistik, 2018, *Indeks Pembangunan Manusia 2018*, BPS RI: Jakarta.
- Tim Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah, 2017, *Indeks Kebahagiaan 2017*, BPS RI:Jakarta
- The History of Harvard University Vol.1 (Boston :Crosby, Nichols, Lee, 1860.
- Vázquez-Barquero, Antonio., 2002, *Endogenous development- Networking, innovation, institutions and cities*- London Routledge Studies in Development Economics. Pp 41-52
- Vázquez-Barquero, Antonio., 2005, " *Urban development in peripheral regions of the New Europe: The case of Vigo in Galicia*," *European Planning Studies*, Taylor & Francis Journals, vol. 14(6), pages 753-772, January.
- Widodo, Teguh., 2015 *Pembangunan Endogen, mengabaikan peran negara dalam pembangunan*, Deepublish, Yogyakarta.

Working and Learning Together to Build Stronger Communities, Scottish Government Guidance for Community Learning and Development, 2004.

Yamamoto, T., 2007, *East meets west in an entrepreneurial farming village in Japan: endogenous development theories and economic gardening practices*. Business and Economic History Online 5 pp. 1-14

Yustika, Ahmad Erani., 2008, *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang : Bayu Media Publishing.